

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR

# 2025



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor pada Tahun 2025, disusun berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta memperhatikan ketentuan pada lampiran II huruf D Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk memberikan penajaman dan keseragaman teknis penyusunan Pelaporan Kinerja bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 - 2026, dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

Bogor, Februari 2026

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



**Ria Marlisa A, S.STP, M.Si.**  
Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 198403102002122001

## DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Daftar Tabel dan Gambar	4
Ringkasan Eksekutif	5
Bab I Pendahuluan	6
1.1.Latar Belakang	6
1.2.Dasar Hukum	7
1.3.Maksud dan Tujuan	7
1.4.Gambaran Umum Organisasi	9
1.5.Isu Strategis dan Permasalahan Umum	11
Bab II Perencanaan Kinerja	13
2.1.Perencanaan Kinerja	13
2.2.Perjanjian Kinerja	15
2.3.Rencana Anggaran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1.Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2.Realisasi Anggaran	35
Bab IV Penutup	39
4.1.Kesimpulan	39
4.2.Saran	39
Lampiran	41

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Strategis Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026	13
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026	13
Tabel 2.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026	15
Tabel 3.1	Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025	10
------------	--	----

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata serta tugas pembantuan. Selain tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kebudayaan dan pariwisata;
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2025 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 5 (lima) sasaran dan 5 (lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2025.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator sasaran hampir seluruhnya tercapai, bahkan ada yang melebihi target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas Perangkat Daerah. Untuk tahun 2025, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja tahunan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor memiliki peran penting dalam pengembangan sektor budaya dan pariwisata sebagai bagian dari upaya peningkatan daya tarik daerah serta kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi ekonomi lokal yang beragam serta potensi wisata yang melimpah, Kabupaten Bogor menjadi salah satu destinasi unggulan di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan guna memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilakukan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan LKIP ini berlandaskan pada berbagai regulasi yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan adanya laporan ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi perbaikan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta memastikan bahwa sumber daya yang digunakan telah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang optimal bagi pembangunan sektor budaya dan pariwisata di Kabupaten Bogor. Dengan adanya LKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan terukur kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya mengenai pencapaian yang telah diraih serta tantangan yang masih perlu diatasi dalam pengembangan budaya dan pariwisata di wilayah Kabupaten Bogor.

## 1.2.Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 7) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026;
- 9) Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026;
- 10) Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024.

## 1.3.Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang Tahun Anggaran 2025. Laporan ini menjadi bagian dari mekanisme evaluasi kinerja yang bertujuan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, serta dampak dari

berbagai kebijakan dan strategi yang telah diimplementasikan dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor.

Tujuan utama penyusunan LKIP ini adalah sebagai berikut:

**1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja**

LKIP ini berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor kepada masyarakat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan adanya laporan ini, seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi secara objektif, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya dapat terwujud.

**2. Sebagai Instrumen Evaluasi dan Perbaikan Kinerja**

Penyusunan LKIP bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kinerja serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dengan adanya evaluasi berbasis data dan indikator kinerja, dinas dapat merumuskan strategi perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program serta memastikan optimalisasi sumber daya untuk pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di masa mendatang.

**3. Mendukung Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan**

Laporan ini menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun kebijakan strategis dan perencanaan program kerja tahun berikutnya. Dengan menganalisis tren kinerja dan efektivitas kebijakan sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif terhadap pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bogor.

**4. Memastikan Keselarasan dengan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Nasional**

Penyusunan LKIP juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan telah selaras dengan rencana pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian, dinas dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

Dengan disusunnya LKIP ini, diharapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dapat terus meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengembangkan potensi budaya dan wisata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata dan kebudayaan secara berkelanjutan.

## 1.4. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dinas ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

### 1. Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis: Mengembangkan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata yang selaras dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan: Melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui program dan kegiatan yang mendukung pengembangan serta pelestarian budaya dan destinasi wisata daerah.
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan: Melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada Bupati.
- 4) Pelaksanaan Administrasi Dinas: Mengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan aset di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
- 5) Pelaksanaan Fungsi Lain: Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebudayaan dan pariwisata, sehingga dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

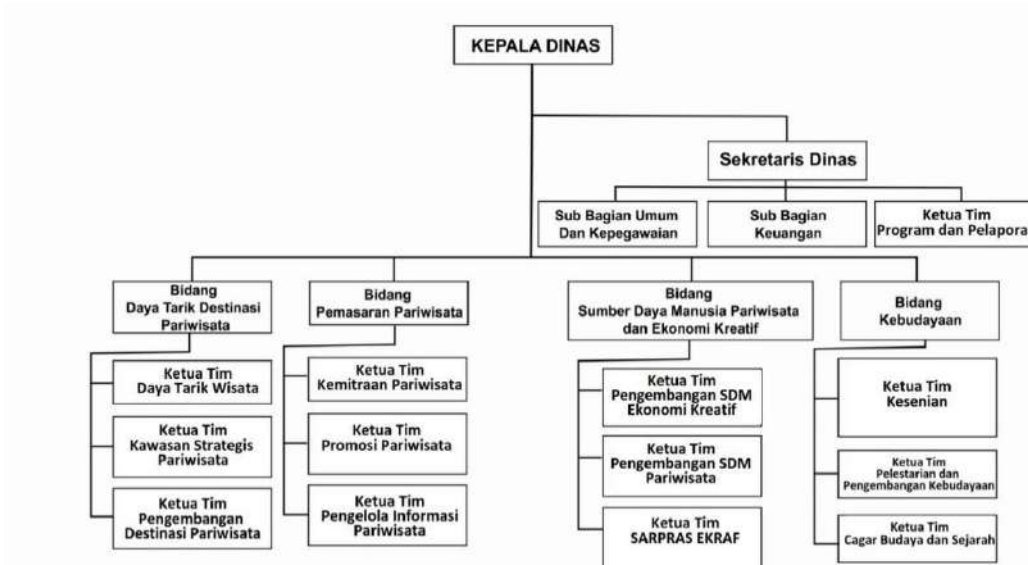
### 3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (berdasar susunan terakhir pasca pergantian kepemimpinan), terdiri atas:

- a. Kepala Dinas, yang dijabat oleh Ria Marlisa A., S.STP, M.Si;
- b. Sekretaris, yang dijabat oleh Dr.Ridwan Said, S.STP, M.Si membawahi:
  - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh Dra. Mila Resmilawaty, MM;
  - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan yang dijabat oleh Eka Noviana Daryatmo, SE., MM; dan
  - 3) Ketua Tim Program dan Pelaporan yang dijabat oleh Romadhoni S. Subekti, S.S.T.Par, MM.Par.
- c. Bidang Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang dijabat oleh Yuliana Idrus. S.TP, M.Si membawahi:
  - 1) Ketua Tim Daya Tarik Wisata yang dijabat oleh Dheni Juli Hasyim, S.T;
  - 2) Ketua Tim Kawasan Strategis Pariwisata yang dijabat oleh Safeli Sarif, SE, MM; dan
  - 3) Ketua Tim Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabat oleh Rudy Hidayat, SS.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata yang dijabat oleh Dharmawan Yogaswara, SH, MM membawahi:
  - 1) Ketua Tim Kemitraan Pariwisata yang dijabat oleh Herti Sulastri, S.Sos;
  - 2) Ketua Tim Promosi Pariwisata yang dijabat oleh Siti Sarah Fatmawati, S.STP, M.I.P.; dan
  - 3) Ketua Tim Pengelola Informasi Pariwisata yang dijabat oleh Jiki Zulkarnaen, S.Sos.
- e. Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dijabat oleh Fitri Sriwahyuni, S.E, M.A membawahi:
  - 1) Ketua Tim Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif yang dijabat oleh Juniati N. Manalu, SE;
  - 2) Ketua Tim Pengembangan SDM Pariwisata yang dijabat oleh Didik Darmadi, S.I.Kom; dan
  - 3) Ketua Tim SARPRAS EKRAF yang dijabat oleh Dadang Siradzudin, SS.
- f. Bidang Kebudayaan, yang dijabat oleh Ike Selviany, A.P, M.Si membawahkan:
  - 1) Ketua Tim Kesenian yang dijabat oleh Andi Yuslin Rosandhi, SE, MM;

- 2) Ketua Tim Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang dijabat oleh Mellya Puspita Sari, SE; dan
- 3) Ketua Tim Cagar Budaya dan Sejarah yang dijabat oleh Indi Richdian, SE.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Bogor Tahun 2025**



### 1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Umum

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu perlu dikenali terlebih dahulu isu-isu strategis serta permasalahan yang ada sehingga Dinas dapat merumuskan arah kebijakan yang tepat guna untuk menyikapinya.

Isu-isu strategis yang telah teridentifikasi antara lain:

- Persaingan antar Destinasi Pariwisata dalam lingkup Provinsi Jawa Barat dan Nasional dalam pembangunan kepariwisataan daerah;
- Sinergitas antar stakeholder yang terkait dalam pariwisata dalam lingkup Kabupaten Bogor;
- Peningkatan aksesibilitas dalam meningkatkan pelayanan kunjungan ke Kabupaten Bogor untuk mengatasi kemacetan dan distribusi wisatawan;
- Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, baik terlibat sebagai tenaga kerja, maupun usaha yang terkait dengan kepariwisataan; termasuk Desa wisata.

Sementara permasalahan-permasalahan umum yang ada antara lain:

- Jumlah kunjungan wisatawan masih belum optimal, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara
- Belum optimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif agar mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah;
- Mulai ditinggalkannya tradisi budaya yang ada di Kabupaten Bogor;

- Rendahnya minat masyarakat terhadap kesenian tradisional;
- Belum optimalnya perlindungan terhadap objek diduga cagar budaya serta pemanfaatan terhadap cagar budaya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Perencanaan Strategis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2024 - 2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026.

#### 1. Visi dan Misi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor adalah:

*"Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban."*

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki maka untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang diemban antara lain:

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berkualitas;
- 2) Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
- 4) Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan;  
dan
- 5) Mewujudkan kesalehan sosial.

#### 2. Tujuan dan Sasaran

Dibawah ini tabel Tujuan, dan Sasaran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026**

Tujuan		Sasaran	
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Baik, Bersih Dan Efektif	Nilai AKIP Perangkat Daerah
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase PDRB(ADHB) Sektor Pariwisata	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Objek Kebudayaan Yang Dilestarikan
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan

### 3. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Pelayanan kewenangan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan efektif	Peningkatan Kualitas Layanan Pariwisata dan Kebudayaan melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Kolaborasi Multi-Stakeholder	Optimalisasi Layanan Pariwisata dan Kebudayaan Berbasis Digital dan Kolaboratif
Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Penguatan Sinergi Kebudayaan dan Pariwisata untuk Meningkatkan Kontribusi terhadap PDRB	Pelestarian dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk penggerak ekonomi masyarakat

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen kesepakatan antara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Bupati Bogor sebagai bentuk komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dokumen ini menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor selama tahun 2025, serta sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik dan pemangku kepentingan. Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### 1. Dasar Hukum

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan regulasi berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Bupati Bogor Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
- 5) Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2024–2026.

### 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, pengelolaan kebudayaan, dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan. Berikut adalah sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan:

**Tabel 2.3**  
**Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata**  
**Kabupaten Bogor Tahun 2024 – 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target 2025
Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Poin	85
Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase PDRB (ADHB) sektor pariwisata	%	5,29
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	77
Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Objek Kebudayaan yang dilestarikan	%	100
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	15000000

Untuk mendukung sasaran strategis di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor melaksanakan program untuk mendukung sasaran. Program-program tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Sasaran Persentase PDRB (ADHB) sektor pariwisata:
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan
  - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
  - d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - e. Program Pemasaran Pariwisata
  - f. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - g. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 3) Sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah :
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 4) Sasaran Persentase Objek Kebudayaan yang dilestarikan:
  - a. Program Pengembangan Kebudayaan
  - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
  - c. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- 5) Sasaran Jumlah Kunjungan Wisatawan
  - a. Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  - b. Program Pemasaran Pariwisata
  - c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  - d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

### **2.3. Rencana Anggaran**

Penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor pada tahun 2025 seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten Bogor. Dalam prosesnya, rencana pendanaan mengalami beberapa perubahan seiring dengan penyesuaian prioritas pembangunan, kebijakan efisiensi belanja, serta dinamika pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memetakan perjalanan perubahan pagu indikatif sebagai dasar perencanaan anggaran Tahun 2025.

Pagu indikatif awal yang dirumuskan dalam dokumen Renja Disbudpar Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp.43.587.045.047. Nilai ini menggambarkan proyeksi kebutuhan anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan pada awal tahun sesuai arah kebijakan pembangunan daerah dan usulan dari masing-masing bidang.

Namun demikian, dalam proses perumusan ke dalam dokumen APBD 2025, pagu yang ditetapkan Oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disetujui oleh Badan Anggaran DPRD menjadi sebesar Rp.38.728.235.056. Nilai ini menjadi pagu riil atau pagu definitif yang diakomodasi dalam APBD murni dan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan hingga triwulan I Tahun 2025.

Dalam proses penjabaran ke dalam dokumen APBD 2025, terjadi rasionalisasi anggaran yang signifikan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Pemerintah, yang menekankan pengurangan anggaran pada pos-pos seperti perjalanan dinas, belanja rapat/pertemuan, belanja makan dan minum, serta belanja modal. Sebagai akibat dari kebijakan ini, rumusan pagu Disbudpar dalam Penjabaran I APBD 2025 dirumuskan turun drastis menjadi sebesar Rp31.994.115.822. Meski demikian, Pemerintah Daerah kemudian memberikan diskresi Bupati berupa penambahan program prioritas sebesar Rp9.851.000.000. Tambahan ini dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan kebudayaan dan event pariwisata, terutama yang terkait dengan peringatan Hari Jadi Bogor, HUT Kemerdekaan RI, serta rehabilitasi dan/atau pemugaran

bangunan dan situs cagar budaya yang menjadi bagian dari prioritas pembangunan berbasis kearifan lokal dan pelestarian warisan budaya daerah. Dengan adanya penambahan diskresi tersebut, maka nilai final yang tertuang dalam dokumen Penjabaran I APBD 2025 menjadi sebesar Rp.41.845.115.822.

Nilai pagu ini tidak berubah dalam Perubahan Penjabaran II APBD 2025, tetap berada pada angka Rp.41.845.115.822, yang menandakan stabilitas penganggaran pada semester kedua. Selanjutnya, dalam proses penyusunan dokumen Perubahan Renja Tahun 2025, dilakukan penyelarasan dan penyesuaian program/kegiatan dengan kondisi aktual pelaksanaan dan realisasi keuangan semester I. Hasilnya, pagu indikatif dalam Perubahan Renja 2025 mengalami peningkatan menjadi Rp.42.601.171.557. Peningkatan ini mencerminkan penyesuaian kebutuhan riil atas kegiatan prioritas yang sebelumnya belum terakomodasi secara optimal, sekaligus untuk memperkuat dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan event strategis daerah yang akan dilaksanakan pada semester kedua.

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas dan fungsi serta mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Akuntabilitas ini mencerminkan sejauh mana efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Bogor.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih serta persentase realisasi anggaran lebih rendah dari capaian kinerja. Penghitungannya dengan cara pengurangan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran.

### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Target, realisasi, dan capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.1**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Pelayanan Kewenangan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan Dan Pariwisata	Poin	85	85,15	100,17
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase PDRB (ADHB) Sektor Pariwisata	%	5,29	5,48	102,07
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan efektif	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	77	61,91	80,4
Meningkatnya Pelestarian Objek Kebudayaan yang dilestarikan	Persentase Objek Kebudayaan yang dilestarikan	%	100	100	100
Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan	15000000	15794607	105,3
Rata-rata pencapaian target: 97,59%					

Untuk pencapaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal Target IKU Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2025 secara lengkapnya akan disajikan dalam bentuk infografis dan narasi pencapaian di bawah ini.

## Tujuan

## Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pariwisata

### Indeks Sistem Merit

#### CAPAIAN 2025

102,07%

TARGET  
10.506.561

REALISASI  
10.724.410

#### PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024  
9.517.176

PENINGKATAN  
REALISASI  
1.207.234

CAPAIAN 2024  
147,58%

PENINGKATAN CAPAIAN  
1,48

#### PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir  
Renstra 2030  
13.512.354

Capaian terhadap  
Target akhir Renstra  
79,37

#### PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI  
NASIONAL  
24.800.000

LEBIH RENDAH  
14.075.590

EFISIENSI ANGGARAN 4,27 %  
Rp. 1.093.382.446,-

#### FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Meningkatnya jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor yang ditetapkan
2. Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
3. Terjaganya Keberlangsungan Upacara Adat di Kabupaten Bogor
4. Semakin Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya di kabupaten Bogor
5. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penetapan Cagar Budaya
6. Terjaganya Keberadaan Cagar Budaya

#### REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI  
2025  
10.724.410

TARGET 2026  
11.735.919

Target  
Tetap

#### UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI

- Penguatan Pariwisata Berkelanjutan dengan mengembangkan penerapan standar usaha bagi destinasi dan pelaku usaha lokal (hotel, restoran, transportasi).
- Membuat program pendampingan bagi Sanggar Seni dan Komunitas Adat
- Membuat acara rutin yang menampilkan Sanggar Seni, Upacara Adat, dan Sajian Tradisi
- Digitalisasi dan Inventarisasi terpadu untuk pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Bogor.

#### PROGRAM TERKAIT

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- Program Pemasaran Pariwisata
- Program Pengembangan Kebudayaan
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

#### TREN PERKEMBANGAN



**Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pariwisata di Kabupaten Bogor** mengalami kenaikan yang stabil, hal ini bisa dilihat dari **Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pariwisata (PDRB-SP) pada Tahun 2025**. Capaian kinerja **Peningkatan Nilai PDRB-SP** telah melebihi harapan yaitu sebesar **102,07%** dengan target di Tahun 2025 sebesar **10.506.561 Juta Rupiah** dan terealisasi sebesar **10.724.410 Juta Rupiah**. Realisasi **PDRB-SP** sebesar **10.724.410** artinya nilai PDRB Sektor Pariwisata di Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 telah melampaui target sebanyak **2,07%**.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi JKW meningkat sebesar **1.207.234 Juta Rupiah** dari capaian di **Tahun 2024** yaitu **9.517.176 Juta Rupiah**. Dari segi pencapaian kinerja mengalami **kenaikan** sebesar **1,48%** dari capaian Tahun 2024 sebesar 100,59% sementara pada Tahun 2025 sebesar 102,07%.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi **nilai PDRB-SP 2025** ini **lebih tinggi** 19,80% dari rata rata realisasi **2022-2024**. Mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rata rata nilai PDRB-SP sebesar **8.601.460 Juta Rupiah**.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Nilai PDRB-SP Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 79,37% dari target akhir RPD sebesar 13.512.354 Juta Rupiah dan terealisasi sebesar **10.724.410 Juta Rupiah**. Pada tingkat nasional, realisasi Nilai PDRB-SP Kabupaten Bogor sebesar 102,07% tersebut memiliki posisi lebih rendah dari rata rata Nasional jika menggunakan perhitungan yaitu membagi Total PDRB Nasional ke jumlah Provinsi yang ada, angka rata-rata ini **tidak menunjukkan distribusi sebenarnya**, karena provinsi seperti Bali dan Jawa Barat jauh di atas rata-rata, sementara provinsi kecil jauh di bawah..

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Nilai PDRB Sektor Pariwisata antara lain: Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor yang Ditetapkan, Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri, Terjaganya Keberlangsungan Upacara Adat di Kabupaten Bogor; Semakin Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya di kabupaten Bogor, Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penetapan Cagar Budaya, Terjaganya Keberadaan Cagar Budaya.

Semua faktor pendukung itu akan dijabarkan lebih lanjut pada penjelasan di bagian narasi IKU Sasaran, karena semua faktor tersebut adalah output dari pelaksanaan Program-program pendukung yang terkait.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya **Nilai PDRB Sektor Pariwisata** beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 4 (empat) Program, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program

Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kebudayaan, dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Berikut ini adalah hasil capaian program-program tersebut di tahun 2025:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Realisasi output di Tahun 2025 mencapai 100%; Dengan pagu anggaran sebanyak Rp.2.572.579.793, terealisasi sebesar Rp.2.484.947.744;
- Program Pemasaran Pariwisata. Realisasi output Program di tahun 2025 mencapai 80% dengan output kegiatan mencapai 127,27%; Pagu anggaran sebanyak Rp.9.396.288.476, terealisasi sebesar Rp.8.453.509.340;
- Program Pengembangan Kebudayaan. Realisasi output di Tahun 2025 mencapai 100%; Dengan pagu anggaran sebanyak Rp.8.243.768.025, terealisasi sebesar Rp.8.223.178.107;
- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Realisasi output mencapai 100%. Dengan pagu anggaran sebanyak Rp.5.369.690.025, terealisasi sebesar Rp.5.327.308.682.

Analisis mendalam dan rinci tentang Program yang mendukung keberhasilan dan juga faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya mengenai IKU Sasaran. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 4,27% atau setara dengan **Rp. 1.093.382.446,-**. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran program-program pendukung sebesar Rp.25.582.326.319,- dan total realisasi sebesar Rp. 24.488.943.873,-

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, semua indikator kinerja dalam program pendukung sasaran sudah tercapai (rincian capaian dapat dilihat pada pembahasan di bagian IKU Sasaran). Oleh karena itu, kinerja dari Tujuan Meningkatnya Nilai PDRB Sektor Pariwisata telah tercapai.

## Sasaran

## Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan

### Indeks Sistem Merit

#### CAPAIAN 2025

105,3%

TARGET  
15.000.000

REALISASI  
15.794.607

#### PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024  
15.496.120

PENINGKATAN  
REALISASI  
298.487

CAPAIAN 2024  
147,58%

PENURUNAN CAPAIAN  
-42,28

#### PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir  
Renstra 2030  
18.000.000

Capaian terhadap  
Target akhir Renstra  
87,75

#### PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI  
NASIONAL  
98,84

LEBIH TINGGI  
6,46

EFISIENSI ANGGARAN 8,61 %  
Rp. 1.030.411.185,-

#### FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor yang ditetapkan
- 2 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata
- 3 Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya
- 4 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri

#### REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI  
2025  
15.794.607

TARGET 2026  
16.000.000

Target  
Tetap

#### UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- ❑ Digitalisasi & Integrasi Data Wisata dengan cara membangun system aplikasi untuk memberi informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Bogor.
- ❑ Penguatan Pariwisata Berkelanjutan dengan mengembangkan penerapan standar usaha bagi destinasi dan pelaku usaha lokal (hotel, restoran, transportasi).

#### PROGRAM TERKAIT

- ❑ Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- ❑ Program Pemasaran Pariwisata

#### TREN PERKEMBANGAN



**Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Bogor** mengalami kenaikan yang stabil, hal ini bisa dilihat dari **Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan (JKW) pada Tahun 2025**. Capaian kinerja **Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisatawan** telah melebihi harapan yaitu sebesar **105,3%** dengan target di Tahun 2025 sebesar **15.000.000 JKW** dan terealisasi sebesar **15.794.607 JKW**. Realisasi **JKW** sebesar **15.794.607** artinya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Bogor pada Tahun 2025 telah melampaui target sebanyak 794.607 wisatawan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi JKW meningkat sebesar **298.487 JKW** dari capaian di **Tahun 2024** yaitu **15.496.120 JKW**. Namun dari segi pencapaian kinerja mengalami **penurunan** sebesar **42,28%** dari capaian Tahun 2024 sebesar 147,58% sementara pada Tahun 2025 sebesar 105,3%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah target yang terlalu tinggi pada Tahun 2025 yaitu 15.000.000 JKW, bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 yaitu 10.500.000 JKW.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi **Jumlah Kunjungan Wisatawan 2025** ini **lebih tinggi** 33,64% dari rata rata realisasi 2022-2023 sebesar **10.480.605 JKW**. Mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rata rata Jumlah Kunjungan Wisatawan sebesar **12.152.443 JKW**.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, JKW Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 83,33% dari target akhir RPD sebesar 18.000.000 JKW terealisasi sebesar **15.794.607 JKW**. Pada tingkat nasional, realisasi Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten Bogor sebesar 105,3% tersebut memiliki posisi lebih tinggi 6,46% dari rata rata Nasional menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memberi sumbangan yang cukup tinggi di sektor kunjungan wisata.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pencapaian Jumlah Kunjungan Wisata antara lain Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor yang Ditetapkan, Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya; dan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri.

1. **Meningkatnya Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Bogor yang Ditetapkan** sebanyak 20 Lokasi. Sepanjang Tahun 2025, Pemkab Bogor telah menetapkan 20 Desa Wisata sebagai Destinasi Pariwisata berbasis masyarakat yang dikelola. Penetapan Desa Wisata sebagai titik fokus dilandaskan pada rencana strategis Disbudpar untuk melakukan penguatan sektor wisata berbasis ekonomi lokal dan ekraf. Hal ini dijabarkan lebih fokus

dalam Renstra dengan mengarahkan desa wisata menjadi lokomotif penggerak ekonomi kreatif daerah. Dengan ditetapkannya 3 Desa Wisata di Kecamatan Bojonggede, 4 Desa Wisata di Kecamatan Caringin, 2 Desa Wisata di Kecamatan Cileungsi, 4 Desa Wisata di Kecamatan Ciomas, 4 Desa Wisata di Kecamatan Citeureup, serta 3 Desa Wisata di Kecamatan Dramaga pada tahun 2025. Selain itu masih ada beberapa Desa Wisata dan Desa Wisata Potensial di Kecamatan-Kecamatan lainnya baik yang sudah dalam proses penetapan Pemda, sedang dalam pembinaan, juga yang telah masuk dalam pendataan Disbudpar. Ragam atraksi dan sajian khas, juga penataan moda penginapan dengan tipe homestay di setiap lokasi Desa wisata bisa mengundang wisatawan tidak hanya untuk berkunjung tapi juga menginap, baik langsung di homestay atau sarana akomodasi lain yang berada di sekitar lokasi. Hal ini mendukung pencaoaian indikator Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata yaitu Tingkat Hunian Akomodasi. Target indikator ini pada Tahun 2025 yaitu sebesar 40% telah berhasil dicapai. Dengan ini diharapkan Destinasi Wisata berbasis masyarakat dengan titik fokus pada pengembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif akan terus bertumbuh dan bertambah.

2. **Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata** yang telah dituangkan dalam bentuk 5 Laporan Kedinasan. Artinya perencanaan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja telah berhasil dilaksanakan dan dilaporkan sesuai target. Beberapa fungsi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata yang telah dilakukan antara lain: Pembinaan Pelaku Usaha Kepariwisataaan, Melaksanakan penerapan Standar Usaha Kepariwisataaan, pengembangan kepariwisataan berbasis masyarakat, penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaku usaha kepariwisataan. Untuk tahapan selanjutnya (Tahun 2026) Disbudpar juga akan menyusun kebijakan teknis terkait penertiban TDU Pariwisata Kabupaten sebagai bagian dari Program beserta kegiatan pendukungnya. Alokasi anggaran yang ada difokuskan untuk meningkatkan daya tarik destinasi wisata di Kabupaten Bogor. Beberapa kegiatan utama meliputi pengembangan dan per-baikkan infrastruktur wisata, promosi destinasi wisata unggulan, serta penyelenggaraan event dan festival yang menarik wisatawan.
3. **Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya** dengan Target sebanyak 4 Dokumen Pemasaran dan telah

tercapai 100%. Artinya –melalui strategi pemasaran yang efektif dan inovatif– target meningkatkan profil pariwisata daerah baik di tingkat nasional maupun internasional yang berfokus pada berbagai kegiatan promosi, kerjasama, dan kampanye pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor telah dilakukan secara optimal. Salah satu upaya utama adalah penggunaan media digital dan sosial untuk mempromosikan destinasi wisata. Kampanye digital melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube memainkan peran penting dalam menarik perhatian calon wisatawan. Konten-konten kreatif yang menampilkan keindahan alam, kekayaan budaya, serta atraksi wisata Kabupaten Bogor dirancang untuk menciptakan kesan positif dan menggugah minat wisatawan untuk berkunjung. Selain itu, Disbudpar juga aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pameran pariwisata seperti keikutsertaan dalam gelar Pameran Inacraft 2025. Pameran semacam ini memberikan kesempatan untuk mempromosikan destinasi wisata Kabupaten Bogor secara langsung kepada agen perjalanan, operator tur, dan calon wisatawan. Melalui pameran ini, hubungan kerjasama dengan pelaku industri pariwisata diperkuat, membuka peluang untuk pemasaran bersama dan paket wisata yang menarik. Kerjasama dengan media massa dan influencer juga menjadi strategi penting yang telah dilakukan oleh Disbudpar seperti melibatkan Juara dan Finalis Moka (Mojang-Jajaka) untuk membuat konten seputar ke-pariwisataan di kabupaten Bogor.

4. **Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri** dengan Target 11 Laporan Kegiatan Pemasaran dan tercapai 100%. Artinya Disbudpar telah terlibat aktif dalam partisipasi dan penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata. Kegiatan yang dimaksud mencakup pengembangan materi promosi fisik seperti brosur, pamflet, dan peta wisata yang disebar di berbagai tempat strategis seperti bandara, hotel, dan pusat informasi wisata. Materi promosi ini dirancang untuk memberikan informasi yang jelas dan menarik tentang destinasi wisata, akomodasi, kuliner, dan atraksi lainnya di Kabupaten Bogor. Selain materi promosi fisik, Disbudpar juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Bogor. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: *Festival Durian* di Kecamatan Leuwiliang, *Festival Batik* di Atrium Cibinong City Mall, *Event Bogor Bike Fest*

di Lapangan Panahan Stadion Pakansari, Piala Bupati Lomba Burung Berkicau di Lapangan Tegar Beriman, Konser *All You Can Hear Gigs* di Pakansari, Event Bogor *Overland* di Halimun Salak, dan Festival jajanan Kampung di depan Masjid Pakansari. Selain itu Disbudpar juga terlibat di supporting Event Festival Bendera Merah Putih. Semua kegiatan tersebut telah mengundang animo masyarakat untuk datang dan berkunjung, terbukti dari banyaknya masyarakat yang datang pada gelaran acara-acara tersebut.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan sebagai upaya perbaikan intervensi (continuous improvement) adalah melakukan Digitalisasi & Integrasi Data Wisata dengan cara membangun system aplikasi untuk memberi informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Bogor. Hal ini telah dilakukan oleh Disbudpar sejak Tahun 2023 dengan membangun aplikasi EKABO (Eksplorasi Kabupaten Bogor) yang menyajikan data-data destinasi wisata dengan menggunakan sistem pencarian berdasar kata kunci dan lokasi Kecamatan di kabupaten Bogor. Aplikasi berbasis web ini bisa diakses pada laman: <https://ekabo.bogorkab.go.id>.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan cara mengembangkan penerapan standar usaha bagi destinasi dan pelaku usaha lokal (hotel, restoran, transportasi). Hal ini juga telah dilakukan oleh Disbudpar dengan cara melaksanakan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan kepada pelaku usaha wisata sebagai bagian dari kegiatan rutin yang telah masuk di dalam program tahunan.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya meliputi 2 (dua) Program, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dan Program Pemasaran Pariwisata. Analisis mendalam dan rinci tentang Program yang mendukung keberhasilan telah tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah

dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 8,61% atau setara dengan Rp.1.030.411.185,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.11.968.868.269,- dan terealisasi sebesar Rp.10.938.457.084,-

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, semua indikator kinerja dalam program pendukung sasaran sudah tercapai. Indikator Tingkat Hunian Akomodasi telah tercapai sebesar 40% dan indikator Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan tercapai sebesar 5%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan telah tercapai.

## Sasaran

Meningkatnya Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan

## Indeks Sistem Merit

### CAPAIAN 2025

100%

TARGET  
100%

REALISASI  
100%

### PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024  
68,69%

PENINGKATAN  
REALISASI  
31,3%

CAPAIAN 2024  
103,4%

PENURUNAN CAPAIAN  
-3,40%

### PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir  
Renstra 2030

100%

Capaian terhadap  
Target akhir Renstra

100%

### PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI  
NASIONAL

N/A

LEBIH  
TINGGI/RENDAH

N/A

EFISIENSI ANGGARAN 0,25 %  
Rp. 20.589.918,-

### FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Terjaganya Keberlangsungan Upacara Adat di Kabupaten Bogor
2. Semakin Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya di kabupaten Bogor

### REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI  
2025

100%

TARGET 2026

N/A



Target  
Tetap

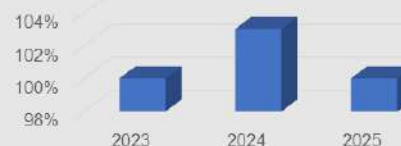
### UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Membuat program pendampingan bagi Sanggar Seni dan Komunitas Adat
- Membuat acara rutin yang menampilkan Sanggar Seni, Upacara Adat, dan Sajjan Tradisi

### PROGRAM TERKAIT

- Program Pengembangan Kebudayaan

### TREN PERKEMBANGAN



**Peningkatan Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Bogor** yang cukup baik bisa dilihat dari **Meningkatnya Presentase OPK yang Dilestarikan pada Tahun 2025**. Capaian kinerja **Peningkatan Jumlah OPK yang Dilestarikan** telah sesuai harapan yaitu sebesar **100%** dengan target di Tahun 2025 sebesar **100%** dan terealisasi sebesar **100%**. Realisasi **Jumlah OPK yang Dilestarikan** sebesar **100%** artinya perbandingan antara jumlah OPK yang Dilestarikan di Kabupaten Bogor dengan Jumlah OPK yang Terdata pada Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Persentase OPK yang Dilestarikan terjadi **peningkatan** sebesar **31,3%** dari realisasi di **Tahun 2024** yaitu **68,69%**. Namun dari segi pencapaian kinerja mengalami **penurunan** sebesar **-3,4%** dari capaian Tahun 2024 sebesar 103,4% sementara pada Tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah target yang lebih tinggi pada Tahun 2025 yaitu 100%, bila dibandingkan dengan target Tahun 2024 yaitu 68,69%. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi **Jumlah OPK yang Dilestarikan Tahun 2025** ini **tidak bisa dianalisis** karena perbedaan rumus perhitungan.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Peningkatan Persentase OPK yang Dilestarikan di Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 100% dari target akhir RPD sebesar 100%. Indikator Peningkatan Persentase OPK yang Dilestarikan ini tidak bisa dianalisis pada tingkat Nasional karena indikator ini belum tersedia nilainya pada tingkat nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Peningkatan Persentase OPK yang Dilestarikan antara lain **Terjaganya Keberlangsungan Upacara Adat di Kabupaten Bogor**, dan **Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya di kabupaten Bogor**.

1. **Terjaganya Keberlangsungan Upacara Adat di Kabupaten Bogor**. Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran ini adalah Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Untuk kegiatan tersebut pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target 14 Objek Pemajuan Kebudayaan yang terdiri dari 14 Upacara Adat yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian upacara adat yang dilakukan oleh Disbupar pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan. Upacara Adat yang dilestarikan antara lain: Ruwahan ( Lebak dan Tonggoh), Seren Taun (Malasari, Cisolada, Padepokan Topeng jigrak), Adat Ponggokan, Sedekah Tutup Taun Tanggal Taun, Pesta Panen (Urug Tonggoh, Urug Tengah, Urug Lebak), Adat Muludan (Urug Lebak).
2. **Semakin Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya di kabupaten Bogor**. Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran ini adalah Pelindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya. Untuk kegiatan tersebut di Tahun 2025 telah tercapai sesuai target 7 Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang berupa pagelaran karya seni khas Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelestarian seni-budaya daerah yang dilakukan oleh Disbudpar pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan. Pementasan dari Sanggar-sanggar Seni binaan Disbudpar di beberapa acara pemerintahan maupun dari instansi/organisasi pengundang seperti PHRI, Kejaksaan Negeri, Paguyuban PKK, Penerimaan Tamu Bupati, acara Car-Free Day, Festival Helaran, adalah beberapa contoh dari penyelenggaraan kegiatan ini.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan adalah membuat program pendampingan rutin bagi Sanggar Seni dan Komunitas Adat. Hal ini telah dilakukan oleh Disbudpar dengan pendataan dan pendampingan pada beberapa Upacara Adat seperti yang telah disebutkan di atas, juga merangkul dan mengakomodasi Sanggar-Sanggar Seni yang telah terdaftar untuk bisa tampil dalam acara-acara resmi pemerintahan maupun undangan khusus untuk memeriahkan acara tertentu.

Upaya lainnya dalam rangka meningkatkan persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan yaitu Membuat acara rutin yang menampilkan Sanggar Seni, Upacara Adat, dan Sajian Tradisi. Hal ini telah dilakukan juga oleh Disbudpar salah satunya dengan menggelar acara rutin seperti Bogor Culture Night di mana pada acara tersebut ditampilkan berbagai macam sajian tradisional seperti tarian daerah, wayang golek, seni angklung, sampai ke tampilan Pencak Silat.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah Program Pengembangan Kebudayaan. Analisis mendalam dan rinci tentang Program

yang mendukung keberhasilan telah tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 0,25% atau setara dengan Rp.20.589.918,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.8.243.768.025,- dan terealisasi sebesar Rp.8.223.178.107,-

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, semua indikator kinerja dalam program pendukung sasaran telah tercapai. Indikator Jumlah Kegiatan Seni Budaya yang Diselenggarakan telah tercapai sebesar 68% Festival/ Upacara Adat sesuai target. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatnya Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan telah tercapai.

## Sasaran

# Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

## Indeks Sistem Merit

### CAPAIAN 2025

102,76%

**TARGET**  
49,66%  
(72 CB)

**REALISASI**  
51,03%  
(74 CB)

### PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

REALISASI 2024  
72 Cagar Budaya

PENINGKATAN  
REALISASI  
2

CAPAIAN 2024  
100%

PENINGKATAN CAPAIAN  
2,76%

### PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Target Akhir  
Renstra 2030

Capaian terhadap  
Target akhir Renstra

55,17%

92,50

### PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL

REALISASI  
NASIONAL

N/A

LEBIH  
TINGGI/RENDAH

N/A

EFISIENSI ANGGARAN 0,79 %  
Rp. 42.381.343,-

### FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

- 1 Meningkatkan kualitas Tata Kelola Penetapan Cagar Budaya
- 2 Terjaganya Keberadaan Cagar Budaya

### REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI  
2025

51,03%

TARGET 2026

N/A

Target  
Tetap

### UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Membentuk Tim Khusus Pelestarian Cagar Budaya.
- Digitalisasi dan Inventarisasi terpadu untuk pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Bogor.

### PROGRAM TERKAIT

- Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

### TREN PERKEMBANGAN



**Peningkatan Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Bogor** yang cukup baik bisa dilihat dari **Meningkatnya Presentase Cagar Budaya (CB) yang Dilestarikan pada Tahun 2025**. Capaian kinerja **Peningkatan Jumlah CB yang Dilestarikan** telah melebihi target yaitu sebesar **102,76%** dengan target di Tahun 2025 sebesar **49,66%** dan terealisasi sebesar **51,03%**. Realisasi **Jumlah CB yang Dilestarikan** sebesar **51,03%** artinya perbandingan antara jumlah CB yang Dilestarikan di Kabupaten Bogor dengan Jumlah CB yang Terdata pada Tahun 2025 sudah melebihi target yang ditetapkan, sebanyak 74 dari 72.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi jumlah Benda Cagar Budaya yang dilestarikan menunjukkan tren positif, mencapai 74 Objek di Tahun 2025, meningkat dari 72 Objek pada Tahun 2024. Sehingga dari segi pencapaian kinerja mengalami **peningkatan** sebesar **2,76%** dari capaian Tahun 2024 sebesar 100% sementara pada Tahun 2025 sebesar 102,76%. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah realisasi fisik yang lebih tinggi yang mengalami penambahan dari jumlah di Tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi **Jumlah CB yang Dilestarikan Tahun 2025** ini **mengalami peningkatan yang cukup stabil**. Rata-rata peningkatan jumlah CB yang Dilestarikan periode 2023-2025 adalah sebesar 2,2% atau 2 Objek per Tahun.

Dari aspek perencanaan jangka menengah, Peningkatan Persentase OPK yang Dilestarikan di Tahun 2025 sudah mencapai batas aman yaitu mencapai 92,50% dari target akhir RPD sebesar 55,17%. Indikator Peningkatan Persentase OPK yang Dilestarikan ini tidak bisa dianalisis pada tingkat Nasional karena indikator ini belum tersedia nilainya pada tingkat nasional.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan Peningkatan Persentase CB yang Dilestarikan antara lain **Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bogor**, dan **Terjaganya Keberadaan Cagar Budaya**.

#### **1. Meningkatnya kualitas Tata Kelola Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten Bogor.**

Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran ini adalah Penetapan Cagar Budaya. Untuk kegiatan tersebut pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target 8 Objek Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penetapan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Disbupar pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan. Objek CB yang telah ditetapkan antara lain: Go'ong Ronngeng Kabuyutan, Batu Tapak Cadas Koneng, Bangunan Sumber Mata Air Ciburial, Lokasi Sumber Mata Air Ciburial, Villa Bung Hatta di Kecamatan Megamendung, Gardu Kelder di Kecamatan Cibinong, Landhuis Kahuripan di Kecamatan Ciseeng, dan Punden Batu Guling di Ciaruteun Ilir Kecamatan Cibinong.

2. **Terjaganya Keberadaan Cagar Budaya di kabupaten Bogor.** Kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran ini adalah Pelindungan Cagar Budaya. Untuk kegiatan tersebut di Tahun 2025 telah tercapai sesuai target sebanyak 74 Objek Cagar Budaya di Kabupaten Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelindungan Cagar Budaya daerah yang dilakukan oleh Disbudpar pada Tahun 2025 telah berjalan sesuai perencanaan. Secara resmi Disbudpat telah mengangkat 1 orang Juru Pelihara (Jupel) dan tenaga pembantu untuk setiap Cagar Budaya yang telah masuk daftar pelestarian. Secara rutin, setiap orang Juru Pelihara ini mendapat pembinaan dari Tim Cagar Budaya Disbudpar dan juga mendapat honor untuk melakukan kegiatan pemeliharaan Cagar Budaya.



Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan adalah membentuk Tim Khusus Pelestarian Cagar Budaya di tingkat Kabupaten untuk mempercepat verifikasi dan penetapan. Hal ini telah dirintis oleh Disbudpar dengan cara menetapkan dan melakukan pembinaan terhadap kelompok Juru Pelihara Cagar Budaya. Selain itu telah dilakukan juga peningkatan kapasitas SDM Juru Pelihara melalui pelatihan konservasi, dokumentasi, dan manajemen data Cagar Budaya oleh Tima Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar pada Tahun 2025, seperti juga tahun-tahun sebelumnya.

Upaya lainnya yang akan dilakukan (masih dalam perencanaan) dalam rangka meningkatkan persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan yaitu melakukan digitalisasi dan inventarisasi terpadu untuk pendataan Cagar Budaya di Kabupaten Bogor. Cara ini bisa dilakukan dengan membuat sistem database lokal berbasis digital (program aplikasi) untuk mendata semua OPK di Kabupaten Bogor. Hal ini bisa dimulai dengan Tim Kecil di Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Lokal untuk melakukan pendataan lapangan, lalu diunggah ke sistem.

Program yang mendukung pencapaian Meningkatnya Persentase Cagar Budaya yang

Dilestarikan beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya adalah Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Analisis mendalam dan rinci tentang Program yang mendukung keberhasilan telah tergambar dalam faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun efisiensi anggaran atas capaian sasaran strategis di atas sebesar 0,79% atau setara dengan Rp.42.381.343,-. Efisiensi ini didapat dari pagu anggaran sebesar Rp.5.369.690.025,- dan terealisasi sebesar Rp.5.327.308.682,-

Berdasarkan pembahasan sasaran strategis di atas, semua indikator kinerja dalam program pendukung sasaran telah tercapai. Indikator Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya telah tercapai sejumlah 8 Objek CB sesuai target. Begitu juga dengan indikator Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi telah tercapai sejumlah 74 Objek CB sesuai target. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatkan Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan telah tercapai.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Penyelenggaraan Urusan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan jumlah program yang dilaksanakan Tahun 2025 sebanyak 8 program yang terdiri dari 19 kegiatan dan 48 sub kegiatan, dengan rincian capaian sebagai berikut:

#### a. Capaian Anggaran

Target anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 sebesar Rp.57.298.369.374,- terealisasi sebesar Rp.53.069.232.590,- atau mencapai 92,62%. Dari capaian tersebut maka tingkat rata-rata capaian anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar 93,59% termasuk dalam predikat kinerja SANGAT TINGGI

#### b. Capaian Kinerja Program

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 8 program, yang terdiri dari 7 program utama dan 1 program penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Program Pengembangan Kebudayaan, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,75%.
- (2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional, terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 97,81%.

- (3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, terdiri dari 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,21%.
- (4) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, terdiri dari 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 98.54% dan tingkat capaian anggaran sebesar 96,59%.
- (5) Program Pemasaran Pariwisata, terdiri dari 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 88,30% dan tingkat capaian anggaran sebesar 89,97%.
- (6) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 83,86%.
- (7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 98,91%.
- (8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota, terdiri dari 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome*/indikator program) sebesar 72,84% dan tingkat capaian anggaran sebesar 89,39%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor telah berhasil mencapai seluruh sasaran kinerja dengan baik. Kelima indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah terpenuhi sesuai target, sehingga menunjukkan adanya konsistensi dalam pencapaian tujuan organisasi serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat dari seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada hasil. Keberhasilan ini sekaligus menjadi dasar bagi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2026, serta menjadi acuan dalam perencanaan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, capaian kinerja Tahun 2025 tidak hanya memberikan gambaran keberhasilan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi pijakan strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong terwujudnya pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor.

#### **4.2 Saran**

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor perlu terus meningkatkan komitmen dalam mempertahankan kualitas kinerja dengan mengedepankan prinsip good governance dan clean governance. Hal ini penting agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perlu menjadi prioritas melalui program pelatihan, pengembangan kompetensi, serta pembinaan berkelanjutan. Dengan SDM yang profesional dan adaptif, diharapkan pelaksanaan program dapat lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tantangan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Dinas juga perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga setiap capaian dapat diukur secara objektif dan dijadikan dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Evaluasi yang komprehensif akan membantu dalam mengidentifikasi kelemahan sekaligus menemukan peluang perbaikan yang dapat diimplementasikan pada periode berikutnya.

Akhirnya, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas, maupun masyarakat, harus terus ditingkatkan. Sinergi yang terbangun akan memperkuat ekosistem kebudayaan dan pariwisata, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan nasional.

# LAMPIRAN

LAMPIRANI KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : 000.8.6.3/288/Sekretariat  
TANGGAL : 19 Juni 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025-2029

Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dan tugas pembantuan

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - d. Pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU					FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029			
1	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Terwujudnya masyarakat yang berbudaya		Nilai PDRB Sektor Pariwisata	10.506.561	353.491.524	351.672.674	369.884.571	388.543.969	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun berkenaan (BPS)	Kepala Dinas	Perhitungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar	80,89	81,41	81,94	82,46	82,98	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya yang dilestarikan	Kepala Dinas	Perhitungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET IKU					FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN		2025	2026	2027	2028	2029			
			budaya yang terdokumentasi dan dilindungi.						/ Jumlah yang terdata		
		Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	15.000.000	16.000.000	16.500.000	17.000.000	17.500.000	Jumlah Kunjungan Wisatawan Ke Akomodasi, DTW, RHU	Kepala Dinas	Perhitungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya daerah sebagai sumber identitas dan pembangunan berkelanjutan.	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	100	100	100	100	100	Jumlah OPK yang dilestarikan / Jumlah OPK yang terdata x 100%	Kepala Dinas	Perhitungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	49,66	51,03	52,41	53,79	55,17	Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi / Jumlah Cagar Budaya Terdata x 100%	Kepala Dinas	Perhitungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,



Ria Marlisa A., SSTP, M.Si

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten  
Renja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor  
Periode Pelaksanaan 2025

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah					Satuan	Target	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	Alasan																										
Indikator Tujuan																																			
1 Nilai PDRB Sektor Pariwisata					Juta Rupiah	10.506.561,00	10.002.195	95,20	Angka Proyeksi sementara																										
Indikator Sasaran																																			
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan					Kunjungan	15.000.000,00	15.794.607,00	105,30																											
2 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan					%	100,00	100,00	100,00																											
3 Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan					%	49,66	49,66	100,00																											
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2030		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan											
			K	Rp.	K	Rp.	K	S	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			Rp.										
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			27										
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
2	22						28.106.172.080				16.321.155.367	377.588.433	7.280.899.325	2.472.199.320	6.068.239.136	16.198.926.214	99,25																		
2	22	02																																	
2	22	02	02																																
2	22	02	02	01																															
2	22	02	02	01	01																														
2	22	02	02	02																															
2	22	02	02	02	01																														
2	22	03																																	
2	22	03	01																																
2	22	03	01	01																															
2	22	03	01	03																															
2	22	05																																	
2	22	05	01																																
2	22	05	01	02																															
2	22	05	02																																
2	22	05	02	01																															
2	22	05	02	02																															
2	22	05	02	02																															
3	26																																		
3	26	02																																	
3	26	02	01																																
3	26	02	01	03																															
3	26	02	02																																
3	26	02	02	02																															
3	26	02	02	05																															

Di Tahun 2025, Sub-Kegiatan ini tidak dilaksanakan tidak mendapat anggaran)

Di Renja Tahun 2025, indikator ini belum digunakan

Dari Tim KSP sudah mengajukan perubahan target di 21.001.100000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2025 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan					
			Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2030			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2025) yang Dievaluasi																				
			K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K	S	Rp.	K							S	Rp.	K	S	Rp.
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							17	18	19	20	21
2.22.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6	Dokumen	226.241.238			2	Dokumen	31.573.400	-	8.842.000	1	4.662.000	1	3.108.000	-	10.851.000,00	2	27.463.000	100,00	96,98	2	27.463.000	33,33	12,14			
2.22.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	821.775.670			5	Laporan	121.068.500	2	25.957.050	3	86.375.000	-	-	-	3.760.000,00	5	116.092.050	100,00	95,89	5	116.092.050	33,33	14,13			
2.22.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48	Laporan	919.538.667			16	Laporan	85.898.168	4	10.226.946	4	20.811.946	4	11.256.946	4	41.947.352,00	16	84.243.190	100,00	98,07	16	84.243.190	33,33	9,16			
2.22.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3	Laporan	1.923.029.746			1	Laporan	254.485.280	-	11.000.000	-	5.125.000	-	14.000.000	1	116.603.000,00	1	146.728.000	100,00	57,66		146.728.000		7,63			
2.22.01.2.02	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen laporan keuangan perangkat daerah</b>	<b>72</b>	<b>Bulan</b>	<b>88.942.162.019</b>			<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>11.094.072.774</b>	<b>3</b>	<b>2.335.894.337</b>	<b>3</b>	<b>3.281.843.769</b>	<b>3</b>	<b>2.361.320.187</b>	<b>3</b>	<b>2.773.795.117</b>	<b>12</b>	<b>10.752.853.410</b>	<b>100,00</b>	<b>96,92</b>	<b>12</b>	<b>10.752.853.410</b>	<b>16,67</b>	<b>12,09</b>	<b>Sub Bagian Keuangan</b>		
2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	192	Orang/bulan	87.316.047.537			64	Orang/bulan	10.898.575.150	58	2.267.154.260	63	3.265.637.880	63	2.302.942.210	64	2.733.334.275,00	64	10.569.068.625	100,00	96,98	64	10.569.068.625	33,33	12,10			
2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3150	Dokumen	991.744.004			1050	Dokumen	101.067.379	118	50.394.617	357	2.705.889	263	31.645.667	312	9.027.867,00	1.050	93.774.040	100,00	92,78	1.050	93.774.040	33,33	9,46			
2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	Laporan	87.108.545			1	Laporan	22.965.425	1	9.345.460	-	-	-	-	-	10.356.055,00	1	19.701.515	100,00	85,79	1	19.701.515	16,67	22,62			
2.22.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	53	Laporan	501.674.970			17	Laporan	65.102.870	4	9.000.000	6	13.500.000	4	20.816.565	3	21.076.920,00	17	64.393.485	100,00	98,91	17	64.393.485	32,08	12,84			
2.22.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	Dokumen	45.586.964			2	Dokumen	6.361.950	-	-	-	-	1	5.915.745	1	0,00	2	5.915.745	100,00	92,99	2	5.915.745	33,33	12,98			
2.22.01.2.05	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>480.422.588</b>			<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>243.980.738</b>	<b>25,00</b>	<b>68.837.513</b>	<b>25,00</b>	<b>73.229.558</b>	<b>25,00</b>	<b>51.529.558</b>	<b>25</b>	<b>49.023.669</b>	<b>100</b>	<b>242.620.298</b>	<b>100,00</b>	<b>99,44</b>	<b>100</b>	<b>242.620.298</b>	<b>100,00</b>	<b>50,50</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		
2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	228	Paket	100.000.000			-	Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.22.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36	Dokumen	405.345.070			12	Dokumen	222.980.738	3	68.837.513	3	53.229.558	3	51.529.558	3	49.023.669,00	12	222.620.298	100,00	99,84	12	222.620.298	33,33	54,92			
2.22.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	30	Orang	75.077.517			3	Orang	21.000.000	-	-	3	20.000.000	-	-	-	0,00	3	20.000.000	100,00	95,24	3	20.000.000	10,00	26,64			
2.22.01.2.06	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Pelayanan Umum Kedinasan</b>	<b>72</b>	<b>Bulan</b>	<b>418.860.087</b>			<b>84,71</b>	<b>Poin IKM</b>	<b>1.770.164.230</b>	<b>-</b>	<b>38.869.500</b>	<b>-</b>	<b>72.567.900</b>	<b>-</b>	<b>51.801.880</b>	<b>84,71</b>	<b>1.476.839.225</b>	<b>84,71</b>	<b>1.640.078.505</b>	<b>100,00</b>	<b>92,65</b>	<b>85</b>	<b>1.640.078.505</b>	<b>117,65</b>	<b>391,56</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		
2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9	Paket	14.065.994			3	Paket	12.059.250	-	-	3	9.029.850	3	-	-	2.314.000,00	3	11.343.850	100,00	94,07	3	11.343.850	33,33	80,65			
2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139	Paket	34.534.186			137	Paket	1.367.109.730	-	-	137	21.090.000	-	-	-	1.233.563.100,00	137	1.254.653.100	100,00	91,77	137	1.254.653.100	98,56	3.633,08			
2.22.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	3	Paket	6.317.920			1	Paket	13.109.500	-	-	-	1	2.442.000	-	-	8.965.060,00	1	11.407.060	100,00	87,01	1	11.407.060	33,33	180,55			
2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	3	Paket	26.383.859			1	Paket	18.073.150	-	-	-	1	4.800.050	1	6.714.025	-	6.074.675,00	1	17.588.750	100,00	97,32	1	17.588.750	33,33	66,66		
2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9000	Laporan	291.548.271			2000	Laporan	324.358.200	170	38.869.500	185	37.648.000	100	14.085.000	1.535	222.022.390,00	1.990	312.624.890	99,50	96,38	1.990	312.624.890	22,11	107,23			
2.22.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	Dokumen	46.009.858			12	Dokumen	35.454.400	-	-	8	-	4	28.560.855	-	3.900.000,00	12	32.460.855	100,00	91,56	12	32.460.855	33,33	70,55			
2.22.01.2.07	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Penunjang Urusan Kedinasan</b>	<b>39</b>	<b>Unit</b>	<b>4.240.535.700</b>			<b>5</b>	<b>Unit</b>	<b>380.700.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>380.598.792</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>380.598.792</b>	<b>100,00</b>	<b>99,97</b>	<b>5</b>	<b>380.598.792</b>	<b>13</b>	<b>8,98</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		
2.22.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39	Unit	4.240.535.700			5	Unit	380.700.000	-	-	5	380.598.792	-	-	-	-	5	380.598.792	100,00	99,97	5	380.598.792	13	8,98			
2.22.01.2.08	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Sarana penunjang Urusan Kedinasan</b>	<b>72</b>	<b>Bulan</b>	<b>1.236.631.083</b>			<b>12</b>	<b>Bulan</b>	<b>831.051.718</b>	<b>3</b>	<b>180.150.524</b>	<b>3</b>	<b>181.672.829</b>	<b>3</b>	<b>205.230.923</b>	<b>3</b>	<b>196.007.786</b>	<b>12</b>	<b>763.082.062</b>	<b>100,00</b>	<b>91,82</b>	<b>12</b>	<b>763.082.062</b>	<b>16,67</b>	<b>61,71</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		
2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	Laporan	362.691.588			36	Laporan	252.690.400	9	43.561.850	9	39.184.155	9	50.779.916	9	63.368.946,00	36	196.894.867	100,00	77,92	36	196.894.867	25,00	54,29			
2.22.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	48	Laporan	873.939.495			12	Laporan	578.361.318	3	136.588.674	3	142.488.674	3	154.471.007	3	132.638.840,00	12	566.187.195	100,00	97,90	12	566.187.195	25,00	64,79			
2.22.01.2.09	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Penunjang Urusan Kedinasan</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>2.427.202.186</b>			<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>9.735.587.583</b>	<b>-</b>	<b>27.193.675</b>	<b>0,07</b>	<b>23.537.789</b>	<b>0,45</b>	<b>155.497.840</b>	<b>0,45</b>	<b>7.580.248.185</b>	<b>97,63</b>	<b>7.786.477.489</b>	<b>97,63</b>	<b>79,98</b>	<b>97,63</b>	<b>7.786.477.489</b>	<b>97,63</b>	<b>320,80</b>	<b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>		
2.22.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33	Unit	163.317.749			21	Unit	116.300.000	-	21.751.986	6	8.021.100	8	34.661.544	7	33.166.387,00	21	97.601.017	100,00	83,92	21	97.601.017	63,64	59,04			
2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53	Unit	434.265.805			21	Unit	234.995.850	-	5.441.689	3	3.716.689	8	4.165.296	10	195.025.581,00	21	208.349.255	100,00	88,66	21	208.349.255	39,62	47,98			
2.22.01.2.09.07	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	360	Unit	167.916.020			146	Unit	89.470.000	-	-	4	11.800.000	69	27.670.000	64	46.880.210,00	137	86.350.210	93,84	96,51	137	86.350.210	38,06	51,42			





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YUDI SANTOSA, S.Sos

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BACHRIL BAKRI

Jabatan : Pj. BUPATI BOGOR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,  
  
BACHRIL BAKRI

Pihak Pertama,  
  
YUDI SANTOSA, S.Sos  
197010271991011002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya pelayanan kewenangan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Bidang Urusan Kebudayaan dan Pariwisata	Poin	84,70
2	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persentase PDRB (ADHB) sektor pariwisata	%	5,29
3	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Daerah	Persentase Objek Kebudayaan yang dilestarikan	%	72,03
	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	15.000.000
4	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Sektor Kebudayaan Dan Pariwisata	Nilai Retribusi Kebudayaan dan Pariwisata	Rupiah	35.000.000

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 17.014.341.177	APBD
2.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp. 4.221.486.975	APBD
3.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp. 2.275.559.432	APBD
4.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp. 1.946.174.575	APBD
5.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp. 3.020.172.434	APBD

No.	Program	Anggaran	Sumber Dana
6.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp. 6.315.195.269	APBD
7.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp. 1.824.725.925	APBD
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp. 2.110.579.269	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025


 RI. BUPATI BOGOR  
  
 BACHRIL BAKRI

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  

  
 YUDI SANTOSA, S.SOS  
 NIP. 67010271991011002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YULIANA IDRUS, S.TP,M.SI

Jabatan : KEPALA BIDANG DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, S.SOS

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Pihak Pertama,

YULIANA IDRUS, S.TP,M.SI  
NIP. 197407302010012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BOGOR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya Entitas Pariwisata Di Kabupaten Bogor	Jumlah Entitas Kepariwisataan di Kabupaten Bogor	Objek	927
		Tingkat hunian akomodasi	%	42.00
	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
2	Meningkatnya Kualitas usaha industri pariwisata	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata	%	52.00
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Persentase jumlah desa wisata atau pokdarwis	%	9.38
4	Meningkatnya pengembangan DTW berbasis alam	Persentase pengembangan DTW berbasis alam	%	5.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp. 351.183.500	APBD
2.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 580.595.550	APBD
3.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 2.088.393.384	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



YUDI SANTOSA, S.SOS  
 NIP. 197010271991011002

KEPALA BIDANG DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA



YULIANA IDRUS, S.TP, M.SI  
 NIP. 197407302010012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TITI SUGIARTI, ST

Jabatan : KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, S.SOS

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Pihak Pertama,

TITI SUGIARTI, ST  
NIP. 197608012002122004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA**  
**DAN EKONOMI KREATIF**  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN BOGOR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran Program</b>			
1	Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Produk Ekonomi Kreatif	%	12.00
2	Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Bersertifikat Kompetensi	%	1.21
	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
3	Meningkatnya Promosi Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Produk ekraf yang dipromosikan	%	25.00
4	Meningkatnya Kualitas Pembinaan SDM Kepariwisataaan	Persentase Peningkatan SDM Pariwisata yang dibina	%	25.00
5	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan SDM Ekonomi Kreatif yang dibina	%	25.00

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Rp. 1.824.725.925	APBD
2.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp. 575.864.559	APBD
3.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Rp. 1.534.714.710	APBD

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



YUDI SANTOSA, S.SOS  
 NIP. 19701027199101100

Cibinong, 30 Januari 2025  
 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA  
 MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI  
 KREATIF

  
 TITI SUGIARTI, ST  
 NIP. 197608012002122004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TITI SUGIARTI, ST

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, S.SOS

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Pihak Pertama,

TITI SUGIARTI, ST  
NIP. 197608012002122004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SEKRETARIS  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

<b>No.</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Nilai IKM Internal Perangkat Daerah	Poin	85
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP perangkat daerah	Poin	72
3	Terpenuhinya layanan pengelolaan keuangan	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	%	100
		Persentase SPM yang menjadi SPPD tepat waktu	%	100
		Persentase kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya	%	100
		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100
4	Terpenuhinya layanan kepegawaian	Persentase ASN yang tertangani layanan kepegawaian tepat waktu	%	100
5	Terpenuhinya pelayanan administrasi umum	Persentase terpenuhinya jasa pelayanan administrasi umum	%	100
6	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang sesuai dengan ketentuan	%	100
7	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100
8	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang terpelihara dengan baik	%	100
9	Terfasilitasinya rumusan kebijakan urusan Kebudayaan Dan Pariwisata	Persentase rumusan kebijakan yang difasilitasi/ diusulkan sesuai Propemperda/Propemperbup	%	100

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 841.837.902	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 12.412.442.954	APBD
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 326.350.056	APBD
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 284.530.779	APBD
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 529.890.000	APBD
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 970.496.136	APBD
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.648.793.350	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA



YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Plt. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA



TITI SUGIARTI, ST  
NIP. 197608012002122004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IKE SELVIANY, A.P, MSI

Jabatan : KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, S.SOS

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Pihak Pertama,

IKE SELVIANY, A.P, MSI  
NIP. 197509271995012001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya Kualitas Perlindungan dan Pemanfaatan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang terlindungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat	%	100
2	Berkembangnya upaya pelestarian kesenian tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan	%	100
3	Meningkatnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan	%	50.00
	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
4	Upacara Adat Yang terjaga keberlangsungannya	Persentase upacara adat yang terjaga keberlangsungannya	%	100
5	Meningkatnya Pementasan Seni dan Budaya	Persentase peningkatan seni budaya yang dipentaskan	%	14.29
6	Meningkatnya Kapasitas SDM dan lembaga Kesenian	Persentase peningkatan SDM Kesenian yang terbina	%	33.33
7	Meningkatnya kualitas tata kelola penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan sesuai standar	%	24.31
8	Terjaganya keberadaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dijaga keberadaannya	%	51.39

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.890.222.525	APBD
2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 331.264.450	APBD

3.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.275.559.432	APBD
4.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp.	135.948.300	APBD
5.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Rp.	1.810.226.275	APBD

Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA



YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN



IKE SELVIANY, A.P, MSI  
NIP. 197509271995012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DHARMAWAN YOGASWARA, SH, MM

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YUDI SANTOSA, S.SOS

Jabatan : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cibinong, 30 Januari 2025

Pihak Kedua,

YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

Pihak Pertama,

DHARMAWAN YOGASWARA, SH, MM  
NIP. 197607222002121005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KABUPATEN BOGOR**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
	<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Kabupaten Bogor	%	5.00
2	Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara Ke Kabupaten Bogor	Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten Bogor	%	5.00
	<b>Sasaran Kegiatan</b>			
3	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah kegiatan pemasaran Pariwisata Kabupaten Bogor	Kegiatan	4

No.	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp. 6.315.195.269	APBD


Cibinong, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



YUDI SANTOSA, S.SOS  
NIP. 197010271991011002

KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA



DHARMAWAN YOGASWARA, SH, MM  
NIP. 197607222002121005